

LAPORAN SINGKAT KOMISI XI DPR RI

BERMITRA DENGAN KEMENTERIAN KEUANGAN, KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (PPN)/BAPPENAS, BANK INDONESIA (BI), OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK): PERBANKAN DAN LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK (LKBB), LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS), BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP), SETJEN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) RI, LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH (LKPP), LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA (LPEI), BUMN (PMN DAN PRIVATISASI), DAN BADAN PENGELOLA INVESTASI (BPI) DAYA ANAGATA NUSANTARA (DANANTARA) DAN PENGELOLAAN *HOLDING* INVESTASI

Rapat Ke : 8
Tahun Sidang : 2025-2026
Masa Persidangan : II
Jenis Rapat/ke- : Rapat Kerja / ke-2
Dengan : Gubernur Bank Indonesia
Sifat Rapat : **Terbuka**
Hari, Tanggal : Kamis, 13 November 2024
Waktu : Pukul 16.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi XI, Gedung Nusantara I Lt. 1
(hadir fisik)
Ketua Rapat : **Dr. H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.**
(Ketua Komisi XI DPR RI)
Sekretaris Rapat : Danis Maya
(Kepala Bagian Sekretariat Komisi XI DPR RI)
Acara : 1. Laporan Panja:
a) Laporan Ketua Panja Penerimaan Anggaran Operasional RATBI Tahun 2026;
b) Laporan Ketua Panja Pengeluaran Anggaran Operasional RATBI Tahun 2026 dan Rencana Penggunaan Cadangan Tujuan (RPCT) Tahun 2026.
2. Pengambilan Keputusan Anggaran Operasional RATBI Tahun 2026 dan Rencana Penggunaan Cadangan Tujuan (RPCT) Tahun 2026;
Hadir : 1. ... orang dari **48 Anggota** Komisi XI DPR RI; dan
2. **PERRY WARJIYO** (Gubernur Bank Indonesia) beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Gubernur Bank Indonesia dilakukan dengan kehadiran secara fisik. Sesuai dengan ketentuan **Pasal 279** dan **Pasal 281 ayat (1)** Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, Ketua Rapat membuka rapat pukul **14.46 WIB** dan dinyatakan **terbuka** untuk umum.

2. Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Gubernur Bank Indonesia diawali dengan pengantar dari Ketua Rapat dan dilanjutkan dengan pemaparan dari Gubernur Bank Indonesia, kemudian dilakukan pendalaman/tanya jawab.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Komisi XI DPR RI dan Gubernur Bank Indonesia menyepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Asumsi makroekonomi yang digunakan Bank Indonesia dalam menyusun ATBI Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

a	Pertumbuhan Ekonomi (% , y-o-y)	5,33
b	Inflasi (% , y-o-y)	2,62
c	Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD)	16.430

2. Komisi XI DPR RI menyetujui Penerimaan ATBI Operasional Tahun 2026 sebesar **Rp36.910.077.693.023,00 (Tiga Puluh Enam Triliun Sembilan Ratus Sepuluh Miliar Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Dua Puluh Tiga Rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut:

KETERANGAN	NOMINAL (dalam rupiah)
Penerimaan AO ATBI Tahun 2026	36.910.077.693.023
1) Hasil Pengelolaan Aset Valas	36.824.825.031.456
2) Penerimaan Kegiatan Kelembagaan	8.891.301.684
3) Penerimaan Administrasi	76.361.359.883

3. Bank Indonesia dalam pengelolaan Penerimaan ATBI Operasional Tahun 2026, melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pengelolaan cadangan devisa yang mengutamakan tujuan menjaga dan meningkatkan nilai cadangan devisa (*preserved value*), serta kecukupan likuiditas valas untuk mendukung kebijakan moneter dengan berpegang pada prinsip investasi pada aset yang aman, kesiagaan pemenuhan kewajiban segera, dan memperoleh pendapatan yang optimal.
 - b. Pengelolaan investasi pada emas dilakukan secara aman, gradual, dan terukur.
 - c. Pengelolaan penerimaan operasional sejalan dengan strategi pengelolaan cadangan devisa yang mengedepankan tujuan menjaga nilai cadangan devisa (*preserved value*) dan kecukupan likuiditas valas untuk mendukung kebijakan moneter di tengah tingginya dinamika pasar keuangan global yang berpengaruh ke pasar keuangan domestik, stabilisasi nilai tukar, serta pembayaran utang pemerintah.
4. Komisi XI DPR RI menyetujui Anggaran Pengeluaran Operasional ATBI Tahun 2026 sebesar **Rp20.827.963.855.019,00 (Dua Puluh Triliun Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Sembilan Belas Rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut:

KETERANGAN	NOMINAL (dalam Rupiah)
Anggaran Pengeluaran Operasional ATBI Tahun 2026	20.827.963.855.019
1) Gaji dan Penghasilan Lainnya	5.956.977.571.311
2) Manajemen Sumber Daya Manusia	3.627.350.299.759
3) Layanan Sarana dan Prasarana	2.824.408.775.074
4) Perumusan dan Pelaksanaan Kelembagaan	2.374.918.060.050
5) Operasionalisasi Kebijakan Utama	2.020.906.857.929
6) Pemberdayaan UMKM, Stabilisasi Harga dan Akseptasi Digitalisasi	715.600.843.463
7) Pelaksanaan Supervisi Bank Indonesia	55.000.000.000
8) Pelaksanaan Edukasi serta Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan	456.694.644.851
9) Pajak	2.288.107.684.167
10) Cadangan Anggaran	507.999.118.415

5. Bauran kebijakan Bank Indonesia tahun 2026 diarahkan untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperkuat sinergi bersama bauran kebijakan nasional:
 - a) Kebijakan moneter diarahkan untuk mempertahankan stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (*pro-stability* dan *pro-growth*);
 - b) Kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran tetap diarahkan pada *pro-growth*.

Pelaksanaan kebijakan akan diperkuat dengan kebijakan pendukung meliputi: Kebijakan pengembangan pasar uang dan pasar valas (PUVA), kebijakan internasional, kebijakan ekonomi keuangan inklusif dan hijau, kebijakan ekonomi keuangan daerah, dan kebijakan yang memperkuat sektor-sektor yang dapat menciptakan lapangan kerja.
6. Bank Indonesia dalam mencapai stabilitas nilai rupiah ditempuh melalui kebijakan moneter yang konsisten dengan pencapaian sasaran inflasi yang ditetapkan pemerintah, dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah yang sejalan dengan nilai fundamental dan mekanisme pasar.
7. Bank Indonesia akan terus membangun kapabilitas kelembagaan yang berkinerja unggul, profesional dan adaptif di era digital yang didukung dengan tata kelola yang baik dalam rangka mendukung respons bauran kebijakan dan keberlanjutan transformasi kebijakan dan kelembagaan.
8. Dalam mencapai arah Bauran Kebijakan Bank Indonesia, Bank Indonesia akan melaksanakan 12 Program Strategis dengan 40 Indikator Kinerja Utamanya (IKU) sebagaimana dalam dokumen Panja Pengeluaran tanggal 12 November 2025, yaitu :
 - 1) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dan Bauran kebijakan Bank Indonesia secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan untuk mencapai stabilitas nilai Rupiah dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;

- 2) Memperkuat sinergi Bauran Kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan kebijakan sektor riil Pemerintah dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
- 3) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta surveilans makroprudensial untuk turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
- 4) Memperkuat sinergi kebijakan dan pengawasan makroprudensial dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dan otoritas terkait untuk turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
- 5) Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta perlindungan konsumen, dalam rangka memelihara stabilitas sistem pembayaran dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
- 6) Memperkuat sinergi kebijakan, pengawasan, dan perlindungan konsumen antara Bank Indonesia dengan Pemerintah, KSSK, dan otoritas terkait untuk percepatan ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
- 7) Mengatur, mengawasi, dan mengembangkan pasar uang dan pasar valuta asing (valas) untuk mendukung efektivitas kebijakan Bank Indonesia serta memperkuat sinergi dengan otoritas terkait untuk pengembangan pasar keuangan dan pembiayaan ekonomi;
- 8) Merumuskan kebijakan dan implementasi pengembangan ekonomi – keuangan inklusif dan hijau, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, serta memperkuat sinergi dan koordinasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan yang berorientasi pada kepentingan nasional;
- 9) Merumuskan kebijakan dan melaksanakan kerjasama internasional dengan bank sentral, organisasi, dan lembaga internasional untuk mendukung efektivitas kebijakan Bank Indonesia serta bersinergi dengan Pemerintah dan otoritas lain dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional;
- 10) Merumuskan dan implementasi bauran kebijakan kelembagaan, serta dukungan organisasi, sumber daya keuangan, dan sumber daya manusia untuk memperkuat kinerja kelembagaan Bank Indonesia yang efektif, efisien, dan bertata kelola baik dan profesional;
- 11) Merumuskan dan implementasi landasan hukum, manajemen risiko, audit internal dan komunikasi untuk memperkuat kinerja kelembagaan Bank Indonesia yang efektif, efisien, dan bertata kelola baik dan profesional;
- 12) Merencanakan, mengembangkan dan mengelola aset fisik dan aset sistem informasi yang terintegrasi untuk memperkuat kinerja kelembagaan Bank Indonesia yang efektif, efisien, dan bertata kelola baik dan profesional.

9. Bank Indonesia terus melanjutkan dan memperkuat transformasi di area kebijakan dan area kelembagaan yang meliputi organisasi dan proses kerja, SDM dan budaya kerja, serta digital dalam rangka membangun bank sentral yang kredibel, profesional, bertata kelola, akuntabel, dan transparan.
10. Komisi XI DPR RI menyetujui Penggunaan Cadangan Tujuan Bank Indonesia (PCTBI) Tahun 2026 sebesar **Rp6.483.948.370.024,00 (Enam Triliun Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribuan Dua Puluh Empat Rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut:

KETERANGAN	NOMINAL (dalam Rupiah)
Penggunaan Cadangan Tujuan Bank Indonesia (PCTBI) Tahun 2026	6.483.948.370.024
A. Penggantian dan/atau Pembaruan Harta Tetap dan Pengadaan Perlengkapan	5.147.163.132.985
B. Peningkatan Kualitas Teknologi	912.495.186.411
C. Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Organisasi	115.530.604.436
D. Penyertaan Modal	-
E. Cadangan	308.759.446.192

11. Rencana Penggunaan Cadangan Anggaran pada Anggaran Operasional sebesar **Rp507.999.118.415,00 (Lima Ratus Tujuh Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Belas Ribuan Empat Ratus Lima Belas Rupiah)** dan pada Cadangan Tujuan sebesar **Rp308.759.446.192,00 (Tiga Ratus Delapan Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Empat Puluh Enam Ribuan Seratus Sembilan Puluh Dua Rupiah)** tahun anggaran berjalan disampaikan kepada Komisi XI DPR RI untuk mendapatkan persetujuan melalui Rapat Kerja. Apabila Rapat Kerja tersebut belum dapat dilaksanakan selambat-lambatnya 30 hari kerja dari permohonan Rapat Kerja, maka Bank Indonesia dapat mengambil langkah-langkah penggunaan Cadangan Anggaran dan dilaporkan kepada Komisi XI DPR RI.
12. Bank Indonesia akan mempertajam substansi laporan capaian kinerja Dewan Gubernur dan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia dengan memperlihatkan laporan kinerja setiap Anggota Dewan Gubernur dalam melaksanakan pembagian tugas dan wewenang Bank Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan perubahannya pada Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

III. PENUTUP

Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Gubernur Bank Indonesia ditutup pada pukul **15.17 WIB**.

Jakarta, 13 November 2025

**PIMPINAN KOMISI XI DPR RI
KETUA RAPAT,**

GUBERNUR BANK INDONESIA,

Dr. H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.

PERRY WARJIYO